



**STRATEGI PENINGKATAN OPERASI KEAMANAN LAUT KOARMADA I GUNA
PENEGAKAN HUKUM DI ALKI I DALAM RANGKA MENJAGA KEDAULATAN
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

*(STRATEGY FOR IMPROVING MARINE SECURITY OPERATIONS OF KOARMADA I FOR
LAW ENFORCEMENT IN ALKI I IN ORDER TO MAINTAIN THE SOVEREIGNTY OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA)*

Jani Sujani, Hariyo Poernomo, Dwi Hartono

Prodi Strategi dan Kampanye Militer

Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

Jani.Sujani@gmail.com

Abstrak

Dinamika dan potensi ancaman di jalur ALKI I menjadi permasalahan yang harus diperhatikan pemerintah Indonesia. Sebagai archipelago state, Indonesia harus mampu menyediakan jaminan keamanan dan keselamatan di wilayah perairannya. Koarmada I telah melaksanakan operasi keamanan laut di ALKI I secara rutin tiap tahun, akan tetapi kondisi keamanan masih tetap terjadi di wilayah ALKI I. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tentang peningkatan Operasi Keamanan Laut Koarmada I guna penegakan hukum di ALKI I dalam rangka menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan Teknik pengumpulan data: studi dokumen, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan masalah terkait regulasi/payung hukum, terbatasnya alutsista yang dimiliki Koarmada I, Kompleksitas masalah keamanan laut di ALKI I, dan terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung operasi keamanan laut di ALKI I. Sedangkan sinergi antar unsur ditunjukkan dengan penggunaan bersama dan sharing data dalam aplikasi pemantauan keamanan laut antara Puskodal Koarmada I dan unsur penegak hukum di laut dalam pelaksanaan operasi keamanan laut saat ini. Kesimpulan penelitian adalah Koarmada I telah melaksanakan operasi keamanan laut di ALKI I tetapi membutuhkan peningkatan yang dapat dilakukan dengan strategi pembentukan dan revisi regulasi yang sesuai dengan kondisi pelanggaran hukum di perairan ALKI I, disertai pening kapasitas dan kompetensi SDM Koarmada I; Mewujudkan suatu kekuatan alutsista yang bisa mengcover seluruh perairan ALKI I; Mewujudkan perbaikan dan peningkatan kerjasama dan meningkatkan sinergi dengan Lembaga pemerintahan terkait dalam penegakan hukum perairan Indonesia; Meningkatkan kapasitas sarana prasarana yang dapat mendukung operasi pengamanan dan penegakan hukum di perairan ALKI.

Kata Kunci: Operasi keamanan laut, Komando Armada I, penegakan hukum di laut, Alur Laut Kepulauan Indonesia I

Abstract

The dynamics and potential threats on the ALKI I route are problems that the Indonesian government must pay attention to. As an archipelago state, Indonesia must be able to provide security and safety guarantees in its territorial waters. Koarmada I has carried out maritime security operations in ALKI I routinely every year, however, security conditions still persist in the ALKI I area. So this research was conducted to analyze the improvement of Koarmada I's Maritime Security Operations in order to enforce the law in ALKI I in order to maintain sovereignty. The Unitary State of the Republic of Indonesia. The method used in this research is qualitative research with data collection techniques: document study, interviews and observation. The research results show problems related to regulations/legal umbrellas, limited defense equipment owned by Koarmada I, complexity of maritime security issues at ALKI I, and limited facilities and infrastructure to support maritime security operations at ALKI I. The results of the research were that problems were found, namely the absence of regulations/legal umbrellas, limited defense equipment owned by Koarmada I, complexity of maritime security issues at ALKI I, and limited facilities and infrastructure to support maritime security operations at ALKI I. Meanwhile, synergy between elements was demonstrated by the use of together and sharing data in maritime security monitoring applications between Puskodal Koarmada I and law enforcement elements at sea in the implementation of current maritime security operations. The conclusion of the research is that Koarmada I has carried out maritime security operations at ALKI I but requires improvement which can be done with a strategy for forming and revising regulations that are in accordance with the conditions of law violations in ALKI I waters, accompanied by improving the capacity and competence of Koarmada I's human resources; Creating a defense equipment force that can cover all ALKI I waters; Realizing improvements and increased cooperation and increasing synergy with relevant government institutions in enforcing Indonesian waters law; Increase the capacity of infrastructure and facilities that can support security and law enforcement operations in ALKI waters.

Keywords: *Maritime security operations, Fleet Command I, law enforcement at sea, Indonesian Archipelagic Sea Lanes I*

Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara Kepulauan (*Archipelagic State*) dengan dasar UNCLOS 1982 dan telah membentuk tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sebagai jalur bagi negara asing melintas melalui Indonesia; ALKI I, ALKI II, ALKI IIIA dan cabang-cabangnya: ALKI IIIB-E (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2002).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia, Alur Laut Kepulauan (ALKI) adalah alur laut yang dilalui oleh kapal atau

pesawat udara asing di atas alur laut tersebut, untuk melaksanakan pelayaran dan penerbangan dengan cara normal semata-mata untuk transit yang terus menerus, langsung dan secepat mungkin serta tidak terhalang melalui atau di atas perairan kepulauan dan laut teritorial yang berdampingan antara satu bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia lainnya (Buntoro, 2012).

Selat Malaka dan ALKI 1 merupakan jalur pelayaran internasional untuk perdagangan dunia dan beberapa negara menggunakan selat ini sebagai jalur perlintasan kapal pengangkut bahan bakar dan bahan industri berbagai negara, sehingga menyebabkan beberapa negara sangat bergantung pada kondisi keamanan serta keselamatan di Selat Malaka maupun ALKI 1. Selat Malaka setiap tahunnya dilintasi ± 60.000 kapal dengan berbagai tipe dengan perbandingan sebesar 28% merupakan kapal niaga yang mengangkut barang-barang perdagangan dunia dan 72% kapal tanker yang membawa pasokan energi dunia melintasi jalur ini (www.rimanews.com, 2014). Sehingga jalur pelayaran ini sangat penting dan diperlukan pengamanan yang optimal.

Operasi Keamanan Laut Koarmada I di ALKI I adalah operasi yang dilakukan oleh Komando Armada Republik Indonesia I (Koarmada I) untuk menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah laut Indonesia di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I. Koarmada I melaksanakan operasi keamanan laut di ALKI I secara rutin dan efektif dengan menggunakan sarana dan prasarana yang memadai, melatih personel yang profesional, serta melakukan koordinasi dan kerjasama dengan entitas kemaritiman lainnya. Operasi keamanan laut Koarmada I meliputi pengawasan maritim, penegakan hukum di laut, pertahanan wilayah laut, serta bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana. Operasi keamanan laut Koarmada I bertujuan untuk mencegah dan menindak pelanggaran dan tindak kejahatan di laut, menjaga kedaulatan dan integritas wilayah laut Indonesia, serta meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan masyarakat pesisir. Dalam melaksanakan operasi keamanan laut Koarmada I di pimpin oleh Pangkoarmada I yang dibantu oleh

pimpinan/staf, Pelaksana staf/pelayanan, Pelaksana pusat, Komando pelaksana pembinaan, dan komando pelaksana operasi/dukungan.

Kondisi saat ini banyak faktor yang dapat menjadi kendala Pemerintah Indonesia dalam mengatasi kegiatan *illegal* di laut dan menjaga kedaulatan di wilayah perairan Indonesia antara lain:

- a. Belum adanya regulasi/payung hukum, peraturan perundang-undangan bagi TNI AL yang berkaitan dengan pelanggaran hukum di perairan Indonesia (ALKI I).
- b. Terbatasnya kemampuan alat utama sistem persenjataan (alutsista) pertahanan membuat tentara yang bertugas menjaga keamanan laut Indonesia jadi tidak maksimal. Keterbatasan ketersediaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) keamanan laut menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh KOARMADA I dalam penegakan hukum di ALKI I untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari jumlah alutsista yang digelar dalam operasi Pam ALKI I yang dilaksanakan sepanjang tahun Waktu Ops 365 hari (Semula 300 Hari + 65 Hari).
- c. Kompleksitas masalah keamanan laut yang membutuhkan sinergi dan koordinasi yang baik antara instansi pemerintah dan pihak-pihak terkait di bidang keamanan laut, seperti TNI AL, Polisi, Bea Cukai, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- d. Sarana dan prasarana dalam rangka mendukung operasi keamanan laut di ALKI I masih sangat terbatas.

Dihadapkan dengan kemampuan alat utama sistem persenjataan (alutsista) pada saat ini yang belum maksimal, terindikasi masih banyaknya kekosongan sektor patrol di wilayah ALKI I. Selain itu, dalam konteks menghadapi permasalahan di ALKI I ini kekuatan yang terlibat tidak hanya kekuatan militer saja. Oleh karena itu, Koarmada I TNI AL juga harus bekerja sama dengan kekuatan pertahanan nir-militer dari instansi lain sesuai konteks ancaman yang terjadi pada waktu tertentu.

Koarmada I TNI AL diharapkan dapat meningkatkan kemampuan interoperabilitas antar matra TNI serta kemampuan kerja sama dengan instansi lain dalam menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan negara, khususnya di Kawasan ALKI I. Sarana dan prasarana

pendukung di pangkalan, terutama untuk dukungan unsur KRI yang sedang beroperasi, masih terbatas terutama dalam hal ketersediaan dermaga untuk bekal ulang bahan cair minyak.

Secara keseluruhan, dalam mengatasi kegiatan ilegal di laut dan menjaga kedaulatan negara, diperlukan upaya yang efektif dan efisien dari pemerintah dan semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan wilayah perairan Indonesia. Dari pertimbangan dan pemikiran tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai strategi peningkatan operasi keamanan laut di ALKI I guna penegakan hukum di laut dalam rangka menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif mampu mengungkap fenomena-fenomena pada suatu Subyek yang ingin diteliti secara mendalam yaitu terkait operasi keamanan laut Koarmada I guna penegakan hukum di ALKI I dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI serta persoalan yang ditemukan. Teknik analisis data yang dilakukan sebagaimana mengutip dari Miles and Hubberman dan Saldana (2014).

Hasil dan Pembahasan

Dalam melaksanakan pengamanan di ALKI I, gelar operasi yang dilaksanakan oleh Koarmada I yang membawahi Guspurla, Guskamla, Lantamal I dan Lantamal IV memiliki sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Terciptanya kondisi penangkalan terhadap berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan di perairan yurisdiksi nasional Indonesia.
- b. Terlindunginya sumber kekayaan alam hayati dan non hayati serta sarana dan prasarana yang berada di laut.
- c. Tetap terpeliharanya keamanan dan ketertiban di laut melalui upaya menegakkan hukum yang berlaku bagi kegiatan yang menggunakan media laut.

- d. Tetap terpeliharanya integritas wilayah perairan Indonesia sebagai bagian dari wilayah NKRI.

Gelar operasi yang dilaksanakan di ALKI I secara umum dilaksanakan oleh Koarmada I dengan Guskamla Koarmada I dan Guspurla Koarmada I sebagai pelaksananya. Adapun unsur Satrol Lantamal I melaksanakan patroli di wilayah kerja Lantamal I dengan berpedoman pada kesiapan material/alut sista dimana dengan keterbatasan jumlah KRI dan Kal dihadapkan dengan luasnya wilayah yang harus dicover.

Kondisi operasi keamanan laut Koarmada I dalam penegakan hukum di ALKI I saat ini

Operasi keamanan laut Koarmada I telah berhasil mengatasi berbagai pelanggaran dan tindak kejahatan di ALKI I, seperti penyelundupan, penangkapan ikan secara tidak sah, pencemaran laut, dan pelanggaran batas wilayah. Operasi keamanan laut Koarmada I juga telah memberikan kontribusi positif bagi perekonomian maritim Indonesia, dengan meningkatkan pendapatan negara dari sektor perikanan, pariwisata, perdagangan, dan transportasi.

Melalui penyelenggaraan Operasi keamanan laut Koarmada I ini, telah menunjukkan komitmen Indonesia sebagai negara kepulauan yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya pesisir dan laut secara berkelanjutan. Akan tetapi, hal ini membuktikan bahwa kondisi operasi keamanan laut Koarmada I guna penegakan hukum di ALKI I belum mampu menciptakan kondisi yang dinamis baik dilihat dari sisi penegakan hukum atau dari sisi sosial ekonomi masyarakat di jalur ALKI I.

A. Belum adanya regulasi/payung hukum, peraturan perundang-undangan bagi TNI AL yang berkaitan dengan pelanggaran hukum di perairan Indonesia

Permasalahan operasi keamanan laut Koarmada I guna penegakan hukum di ALKI I dalam rangka menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diantaranya belum adanya regulasi/payung hukum, hal ini belum sesuai dengan teori strategi yang dibuat oleh **Carl von Clausewitz** dalam karyanya yang terkenal, "*On War*", Clausewitz menekankan pentingnya faktor-faktor psikologis dan politik dalam perang,

dan bahwa perang adalah cara untuk mencapai tujuan politik. dikaitkan dengan pelanggaran hukum yang ditemukan di perairan ALKI I seperti pembajakan (*piracy*), perompakan (*armed and robbery*), penyeleundupan (senjata, amunisi, narkoba, atau barang psikotropika), kejahatan lintas negara (*transnational crime*), terorisme melalui laut, pencurian kekayaan alam (*illegal fishing, logging, mining, dan illegal oil* atau Bahan Bakar Minyak), pencemaran lingkungan laut, penggunaan bahan peledak (*handak*), penggunaan jenis alat tangkap yang dilarang, terorisme, sabotase objek vital, dan musibah kecelakaan di laut.

Dari beberapa pelanggaran hukum diatas TNI AL hanya ada 2 yang bisa dilaksanakan penyidikan yaitu tentang *illegal fishing* dan masalah pelayaran itu pun untuk penyidikan lanjutan harus berkoordinasi dengan PT. Pelindo tentang pelanggaran administrasi, sehingga optimal dalam pemahaman dan penguasaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum di perairan Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi di perairan Indonesia, seperti *illegal fishing*, penyelundupan, dan pencurian. Selain itu, masih terdapat SDM yang belum memahami dan menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum di perairan Indonesia, sehingga mereka tidak dapat melakukan penegakan hukum secara efektif.

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Angkatan Laut Indonesia dalam penegakan hukum maritim di perairan Indonesia adalah pemahaman dan penguasaan yang belum optimal terhadap undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan penegakan hukum di perairan Indonesia oleh sumber daya manusia.

Berikut adalah beberapa permasalahan yang timbul dari SDM yang belum optimal dalam pemahaman dan penguasaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum di perairan Indonesia:

- 1) Rendahnya efektivitas penegakan hukum di perairan Indonesia.
- 2) Tingginya angka pelanggaran hukum di perairan Indonesia, seperti *illegal fishing*, penyelundupan, dan pencurian.

- 3) Kerugian ekonomi yang dialami oleh Indonesia akibat pelanggaran hukum di perairan Indonesia.
- 4) Kerusakan lingkungan yang terjadi di perairan Indonesia akibat pelanggaran hukum.
- 5) Ancaman terhadap kedaulatan Indonesia.

B. Alutsista yang dimiliki Koarmada I dalam penegakan hukum di ALKI I

Koarmada 1 sebagai Kotama Bin, dalam pelaksanaan tugas pokok didukung oleh Komando Pelaksanaan Pembinaan yang terdiri dari Satuan Kapal Eskorta (Satkor), Satuan Kapal Selam (Satsel), Satuan Kapal Cepat (Satkat), Satuan Kapal Ranjau (Satran), Satuan Kapal Amfibi (Satfib), Satuan Kapan Bantu (Satban), Satuan Komando Pasukan Katak (Satpaska), Satuan Marinir (Satmar), Komando Latihan (Kolot), dan Satuan Udara (Satud) (koarmada1.tnial.mil.id/).

Keterbatasan ketersediaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) keamanan laut menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh Koarmada I dalam penegakan hukum di ALKI I untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Hal ini bisa di lihat dari jumlah alutsista yang digelar dalam operasi Pam ALKI I yang dilaksanakan sepanjang tahun Waktu Ops 365 hari (Semula 300 Hari + 65 Hari) hanya terdiri kekuatan unsur satgas sebagai berikut:

- 1) 1 PK : 74 Personil
- 2) 1 KCR 40 : 43 Personil
- 3) 1 FPB : 55 Personil
- 4) 2 PC : 72 Personil
- 5) 1 NC-212 : 7 Personil
- 6) TIM PASKA : 5 Personil
- 7) TIM KESEHATAN: 3 Personil
- 8) TIM PENERANGAN : 2 Personil
- 9) PKL TNI AL : 29 Personil
- 10) SATGAS : 10 Personil

JML : 300 PERS (semula 270 Personil + 30 Personil)

Keterbatasan ini dapat menghambat efektivitas operasi penegakan hukum di perairan Indonesia. Berikut adalah beberapa permasalahan yang timbul dengan keterbatasan alutsista di ALKI I dalam penegakan hukumnya:

- 1) Keterbatasan dalam deteksi dan pemantauan
- 2) Keterbatasan dalam intervensi dan penindakan
- 3) Keterbatasan dalam mobilitas dan jangkauan
- 4) Keterbatasan dalam perlindungan personel
- 5) Keterbatasan dalam komunikasi dan koordinasi

Keterbatasan alutsista yang di gelar oleh Koarmada I membuat Koarmada I tidak dapat melakukan penegakan hukum secara efektif. Hal ini berimplikasi pada angka pelanggaran hukum di perairan ALKI I semakin tinggi. Pelanggaran hukum yang terjadi di perairan ALKI I dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi Indonesia.

C. Kompleksitas masalah keamanan laut di ALKI I

Kompleksitas masalah keamanan laut di perairan Indonesia membutuhkan sinergi dan koordinasi yang baik antara instansi pemerintah dan pihak terkait di bidang keamanan laut keadaan ini belum sesuai dengan Konsep strategi **Liddel Hart** (1921-1953) mendefinisikan strategi sebagai suatu seni dalam mendistribusikan dan mengerahkan sarana-sarana militer untuk mencapai tujuan politik dengan konsep "*indirect approach*" atau pendekatan tidak langsung, strategi ini sebagai cara untuk mengalahkan musuh dengan menghindari pertempuran frontal atau langsung yang menimbulkan kerugian besar bagi kedua belah pihak.

Di Indonesia sendiri, TNI AL bukanlah aktor tunggal yang memiliki keberperanan dalam menjaga laut. Hingga saat sekarang, terdapat kurang lebih 7 Kementerian/Lembaga yaitu TNI-Angkatan Laut, POLRI-Direktorat Kepolisian Perairan, Kementerian Perhubungan Dirjen Hubla, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Dirjen PSDKP, Kementrian Keuangan-Dirjen Bea Cukai, Bakamla, dan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (Satgas 115) yang memiliki tugas dan fungsi menjaga laut nasional Indonesia agar terlepas dari tindak kejahatan yang dapat mengancam keamanan di wilayah perairan Indonesia (law.ui.ac.id, 2018).

Dalam konteks operasi keamanan laut di wilayah ALKI I, konsep ini dapat diaplikasikan dengan melakukan kerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti TNI AL, Polisi, Bea Cukai, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. TNI AL bertanggung jawab dalam menjaga pertahanan negara, sementara Badan Keamanan Laut Indonesia (Bakamla) bertugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia (bakamla.go.id, 2024).

Komplekitas permasalahan keamanan laut yang timbul di ALKI I diantaranya: Penangkapan ikan secara tidak sah (*illegal fishing*); Penyelundupan; Kejahatan transnasional; Perubahan iklim; Keterbatasan sumber daya.

D. Sarana dan prasarana dalam rangka mendukung operasi keamanan laut di ALKI I

Salah satu permasalahan utama adalah keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia untuk mendukung operasi keamanan laut di ALKI I adalah Kurangnya jumlah kapal patroli, peralatan komunikasi yang terbatas, infrastruktur radar yang terbatas, dan sistem pemantauan maritim yang tidak memadai dapat mempengaruhi efektivitas operasi keamanan laut.

Keterbatasan Keterbatasan dukungan BBM B0 dan B35 di sebaran dermaga yang ada di ALKI I, dimana pada data sebaran pangkalan jajaran Koarmada I di jalur ALKI I dengan dukungan infrastuktur dermaga sebaran logistik BBM.

Berikut ini adalah beberapa aspek penting sarana dan prasarana yang dapat mendukung operasi KRI dalam operasi keamanan laut di ALKI I:

- a. Keterbatasan ini membuat sulit bagi KOARMADA I untuk melakukan patroli yang efektif, pemantauan yang cermat, serta penegakan hukum yang optimal di perairan

ALKI I. Permasalahan dalam aspek sarana dan prasarana dalam rangka mendukung operasi keamanan laut di ALKI I masih sangat terbatas.

- b. Pangkalan Laut dan Dermaga: Pangkalan laut yang dilengkapi dengan dermaga yang memadai dalam hal logistik BBM B0 dan B35 sangat penting untuk keberangkatan, kedatangan, perawatan, dan perbekalan KRI. Dermaga yang cukup besar dan lengkap dapat menampung KRI dengan aman untuk pemeliharaan, logistik pengisian bahan bakar, dan beban-logistik lainnya.
- c. Fasilitas Perbaikan dan Pemeliharaan: Fasilitas perbaikan kapal, bengkel, dan pusat pemeliharaan diperlukan untuk melakukan perbaikan rutin, perawatan, dan perbaikan besar terhadap KRI. Ini termasuk peralatan dan tenaga ahli yang dibutuhkan untuk memastikan KRI tetap dalam kondisi yang baik dan siap beroperasi.
- d. Sistem Komunikasi: Sistem komunikasi yang handal adalah kunci dalam memastikan komunikasi yang efektif antara KRI dan markas Komando. Ini juga penting untuk memfasilitasi pertukaran informasi dengan kapal lain, pesawat udara, dan entitas lainnya dalam wilayah ALKI I.
- e. Fasilitas Logistik: Fasilitas penyimpanan dan distribusi logistik, termasuk bahan bakar, amunisi, air tawar, makanan, dan peralatan lainnya, harus tersedia untuk mendukung operasi KRI dalam jangka waktu yang panjang di laut.
- f. Peralatan Navigasi dan Pemantauan: Peralatan navigasi seperti radar, sonar, GPS, dan peralatan pemantauan lainnya sangat penting dalam membantu KRI melakukan navigasi yang akurat, mendeteksi ancaman, dan mengawasi perairan.
- g. Peralatan Keamanan dan Pertahanan: Peralatan keamanan seperti senjata, sistem pertahanan udara, dan sistem pertahanan anti-kapal musuh (ASuW) diperlukan untuk melindungi KRI dari ancaman potensial.
- h. Peralatan Pemantauan Lingkungan: Peralatan untuk memantau kondisi lingkungan seperti cuaca, arus laut, gelombang, dan lainnya membantu KRI mengantisipasi dan mengatasi tantangan yang mungkin muncul selama operasi.

- i. Peralatan Penyelamatan dan Evakuasi: Peralatan keselamatan dan evakuasi, seperti sekoci, peralatan penyelamatan, dan prosedur evakuasi darurat, harus siap digunakan untuk melindungi awak KRI dalam situasi darurat.
- j. Penginapan dan Fasilitas Kehidupan Sehari-hari: Fasilitas untuk penginapan awak, termasuk tempat tidur, makanan, dapur, dan fasilitas sanitasi, diperlukan untuk memastikan kesejahteraan dan kinerja awak KRI selama operasi jangka panjang.

Semua sarana dan prasarana ini adalah bagian integral dari dukungan operasional KRI dalam menjalankan misi dan tugas keamanan laut di ALKI I. Keberhasilan operasi KRI bergantung pada ketersediaan, kesiapan, dan kualitas dari berbagai elemen ini.

Sinergi antar instansi penegak hukum di laut dalam pelaksanaan operasi keamanan laut saat ini

Sesuai teori sinergi bahwa Synergistic menghasilkan *output* yang jauh lebih besar dan tentunya akan memberikan *impact* yang lebih luas. Konsep operasi Kamla selama ini yang dilaksanakan masih bersifat mandiri dan kurang terorganisir dengan baik dan terpusat hanya akan menghasilkan level kerjasama *Respectful* bahkan tidak jarang *Defensif*. Harapan Konsep operasi yang akan datang kegiatan operasi Kamla khususnya dalam penggelaran kekuatan dapat dilaksanakan dengan kerja sama yang tinggi secara terpadu dan saling mempercayai di antara seluruh Instansi Kamla dalam gelar kekuatan diharapkan dapat menciptakan situasi aman kawasan ALKI-I.

Keterlibatan pengamanan ALKI I tidak lepas peranan Pushidrosal dalam melaksanakan pemetaan dan control alur termasuk di dalamnya TSS (*Traffic Separation Strait*) yang ada di Selat Sunda. Dengan padatnya lalu-lintas pelayaran internasional, nasional, maupun tradisional, maka juga perlu dibuat skema pemisahan lalu-lintas laut (*Traffic Separation Scheme*) untuk lebih menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran terutama pada alur pelayaran yang sempit dan padat dengan mempertimbangkan lalu lintas pelayaran lokal, yang secara umum berkaitan dengan implementasi gagasan tol laut. Sebagai

pendekatan, pemerintah bisa memprioritaskan, merancang, dan segera menerapkan TSS di keempat jalur pelayaran internasional milik Indonesia yang sudah terbukti padat dan memerlukan penanganan yang cepat seperti di Jalur ALKI I (Selat Sunda) dan Jalur ALKI II (Selat Lombok). Kemudian dilanjutkan dengan perancangan dan penerapan yang sama dilakukan di beberapa Selat di Indonesia yang telah terbukti padat lalu-lintasnya; Selat Malaka, Selat Makassar, Selat Ombai dan Selat Wetar (Harjo Susmoro, Amril, Oke Dwiyan, 2019).

Dalam hal sinergi antar instansi penegak hukum di laut dalam pelaksanaan operasi keamanan laut saat ini, dapat ditunjukkan pada penggunaan bersama aplikasi pemantauan keamanan laut antara Puskodal Koarmada I dan unsur lainnya sebagai berikut:

Puskodal Koarmada I dalam memantau wilayah kerja Koarmada I selain dengan peralatan tersebut diatas juga menggunakan beberapa aplikasi yaitu:

- a. *Sea Visison* Aplikasi bantuan Amerika.
- b. *Vessel Scrutiny* aplikasi milik Bakamla.
- c. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (*Webtrack*).
- d. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (*Maritime Portal*).

Puskodal juga sudah melaksanakan koordinasi dengan K/L terkait, hanya sebatas koordinasi, belum dalam bentuk MOU atau PKS. Adapun koordinasi yang sudah dilaksanakan antara lain:

- a. Kogabwilhan I (Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I), melalui pertukaran email, karena aplikasi yang dimiliki hampir sama namun Kogabwilhan sangat terbatas jumlah personelnnya.
- b. PIM (Pusat Informasi Maritim). Setiap hari kita akan mendapatkan email terkait hasil monitoring harian oleh PIM terkait situasi perairan Indonesia.
- c. Bakamla (Badan Keamanan Laut RI). Kerjasama selama ini yang sudah dilaksanakan antara lain, pemberian aplikasi AIS Monitoring milik Bakamla yaitu *Vessel Scrutiny* untuk di install/tersambung di komputer milik Puskodal Koarmada I.

- d. KKP (Kementrian Kelautan dan Perikanan). Kerjasama selama ini yang sudah dilaksanakan antara lain pertukaran informasi jika dibutuhkan, dan pemberian aplikasi Vessel Monitoring System (VMS) milik KKP yaitu Webtrack untuk di install/tersambung di komputer milik Puskodal sehingga mampu mendeteksi pergerakan kapal ikan diperairan Indonesia.
- e. IFC (*International Fuc Officer*) Singapura. Dari LO Indonesia yang bertugas kita juga akan mendapatkan laporan harian dan laporan bulanan hasil pantauan oleh ILO Singapura baik di perairan Indonesia ataupun situasi perairan global.
- f. Sharing data dapat diperoleh dengan cara berkoordinasi dengan satuan atau instansi terkait, setiap dari hasil sharing data yang diperoleh Puskodal Koarmada I akan ditindak lanjut seperti pengerahan unsur operasi yang ada dilokasi menjadi fokus perhatian. Hasil yang diperoleh akan di infokan kembali sebagai jawaban atas aksi yang telah dilaksanakan.

Strategi peningkatan operasi keamanan laut Koarmada I guna penegakan hukum di ALKI I dalam rangka menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang No. 34 Tahun 2004 mengamanatkan tentang Trinitas TNI AL sebagai *Military Role* (Peran Militer) yaitu peran dalam penggunaan kekuatan secara optimal, *Diplomatic Role* (Peran Diplomasi) yaitu berperan sebagai sarana diplomasi dalam mendukung kebijakan luar negeri pemerintah dan *Constabulary Role* (Peran Polisionil) yaitu berperan dalam rangka menegakkan hukum di laut, melindungi sumber daya dan kekayaan laut nasional, memelihara ketertiban di laut, serta mendukung pembangunan bangsa dalam memberikan kontribusi terhadap stabilitas dan pembangunan nasional.

Dengan demikian TNI Angkatan Laut selaku komponen utama pertahanan dan keamanan di laut bersama-sama dengan 11 Instansi Kamla lainnya diantaranya Badan Koordinasi Keamanan di Laut (BAKORKAMLA) dan Direktorat Perhubungan Laut c.q. Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), sesuai bidang dan kewenangan masing-masing dalam melaksanakan pengerahan dan penggelaran kekuatan di laut.

Pengeralahan dan penggelaran kekuatan tersebut meliputi gelar operasi secara permanen (*deployment*) bersifat statis berupa gelar pangkalan dan gelar stasiun radar pantai, sedangkan gelar penindakan (*employment*) yang bersifat dinamis berupa gelar kekuatan dengan menghadirkan unsur KRI / kapal patroli, pesawat udara maritim dan pengeralahan pasukan.

Pelaksanaan gelar kekuatan yang telah dilaksanakan oleh institusi Kamla terkait khususnya ketiga institusi diatas sampai saat ini dirasa belum optimal karena masih kurangnya kerja sama antar institusi dan adanya beberapa keterbatasan yang ada baik anggaran, personil, Alat Utama Sistem Senjata (Alut Sista) berupa kapal / pesawat udara patrol, sehingga perlu ada langkah strategis dalam gelar kekuatan dalam mengatasi gangguan keamanan ini secara sinergis diantara para pemangku kebijakan setiap Institusi keamanan di laut (Kamla) guna mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis.

Kemudian, mengacu pada teori strategi yang merupakan suatu proses yang mengidentifikasikan *ends* (tujuan), *ways* (cara) dan *means* (sumber daya). *Ends* merupakan tujuan atau hasil yang diinginkan dari strategi yang dilakukan. Istilah *end-state* identik dengan akhir dari tujuan strategi. *Ways* adalah tindakan atau metode dan proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sedangkan Means adalah seluruh sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan metode dan proses tersebut.

Fenomena wilayah perbatasan di ALKI I, tentunya akan menjadi ancaman potensial terhadap kedaulatan NKRI, apabila tidak direspon dan disikapi secara bijak. Sehingga sangat penting dalam operasi keamanan laut Koarmada I guna penegakan hukum di ALKI I agar dapat mengoptimalkan:

- a. Sumber daya manusia dalam pemahaman dan penguasaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum di perairan Indonesia.
- b. Ketersediaan alutsista yang dimiliki Koarmada I dalam penegakan hukum di ALKI I.
- c. Sinergi dan koordinasi yang baik antara instansi pemerintah dan pihak-pihak terkait di bidang keamanan laut, seperti TNI AL, Polisi, Bea Cukai, dan Kementerian Kelautan

dan Perikanan dalam penyelesaian kompleksitas masalah keamanan laut dan Ketersediaan

- d. Sarana dan prasarana dalam rangka mendukung operasi keamanan laut di ALKI I terpenuhi.

Penggelaran kekuatan Koarmada I di ALKI I ini, sesuai dengan konsep Strategi Pertahanan Laut Nusantara pada masa damai ditujukan untuk menimbulkan dampak penangkalan yang tinggi terhadap niat dari pihak-pihak yang akan mengancam kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI. Selain itu untuk menciptakan kondisi perairan yurisdiksi nasional yang terkendali dan ditata dalam bentuk gelar operasi laut untuk penangkalan dan pengendalian laut. Semua tujuannya untuk *deterrence (penangkalan)*, yang dilakukan dengan operasi sehari-hari berupa Operasi Keamanan Laut.

Oleh karena itu, untuk mencapai hal tersebut diharapkan adanya indikator keberhasilan yang apabila tidak dapat diwujudkan maka kompleksitas permasalahan di wilayah ALKI I akan terus berkembang. Sehingga keberhasilan dalam merespon dan menyikapi kompleksitas permasalahan di wilayah ALKI I ada hal-hal penting dan strategis yang mutlak diwujudkan sebagai indikator keberhasilan sebagai berikut:

- a. Terwujudnya regulasi/payung hukum, peraturan perundang-undangan bagi TNI yang berkaitan dengan pelanggaran hukum di perairan Indonesia;
- b. Terselenggaranya ketersediaan alutsista yang dimiliki Koarmada I dalam penegakan hukum di ALKI I;
- c. Terwujudnya Sinergi dan koordinasi yang baik antara instansi pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam masalah keamanan laut di ALKI I;
- d. Terselenggaranya Ketersediaan Sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka mendukung operasi keamanan laut di ALKI I terpenuhi.

Selanjutnya, strategi dan upaya yang dirumuskan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya adalah sebagai berikut.

A. Strategi Pertama. Mewujudkan pembentukan dan revisi regulasi/payung hukum yang sesuai dengan kondisi dan kepentingan nasional dalam mengatasi pelanggaran hukum di perairan ALKI I, disertai dengan meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM Koarmada I dalam bidang penegakan hukum di perairan ALKI I melalui pelatihan, pendidikan, dan sertifikasi yang berkualitas dan sesuai dengan standar internasional yang bisa memperkuat pengawasan di perairan ALKI I dengan mengoptimalkan strategi penegakan dan pertahanan laut Indonesia.

Koarmada I sebagai komponen TNI Angkatan Laut yang bertanggung jawab atas keamanan dan kedaulatan perairan ALKI I, mengimplementasikan serangkaian strategi untuk mendorong pembentukan dan revisi regulasi atau payung hukum yang sejalan dengan kondisi dan kepentingan nasional. Upaya ini bertujuan untuk mengatasi berbagai pelanggaran hukum yang mungkin terjadi di wilayah perairan tersebut. Berikut adalah beberapa upaya yang dilakukan oleh Koarmada I:

- 1. Regulasi.** Koarmada I mengkomitmenkan diri untuk terus berupaya guna mendorong pembentukan dan revisi regulasi/payung hukum yang mampu mengatasi pelanggaran hukum di perairan ALKI I. Keyakinan yang dipegang adalah dengan adanya regulasi yang sesuai dan adaptif, Koarmada I akan lebih mampu menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien, serta memberikan kontribusi yang lebih besar dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara di wilayah perairan yang penting ini.

Secara keseluruhan, langkah-langkah yang telah diambil oleh Koarmada I mencerminkan komitmen kuat untuk memastikan bahwa regulasi hukum yang berlaku benar-benar mendukung pelaksanaan tugasnya, serta mempertahankan kedaulatan dan keamanan negara di perairan ALKI I. Melalui kerja sama dan usaha berkelanjutan ini, diharapkan tantangan pelanggaran hukum di wilayah perairan tersebut dapat diminimalkan dan diatasi dengan lebih efektif.

- a) Melakukan kajian dan penelitian yang mendalam terhadap kondisi perairan ALKI I serta kebutuhan regulasi yang sesuai. Kajian ini melibatkan pakar hukum, analisis keamanan, dan ahli kelautan guna memastikan bahwa regulasi yang dibentuk benar-benar responsif terhadap tantangan yang dihadapi di lapangan.
- b) Terlibat dalam advokasi dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait, seperti instansi pemerintah yang relevan dan lembaga legislatif. Tujuan dari langkah ini adalah untuk membantu mengarahkan pembentukan atau revisi regulasi/payung hukum agar lebih sesuai dengan realitas perairan ALKI I dan kepentingan nasional.
- c) Menyediakan data dan informasi yang akurat mengenai situasi di perairan ALKI I kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembentukan atau revisi regulasi. Data yang diberikan ini membantu memperkuat argumen dan dasar hukum yang kuat untuk perubahan regulasi yang lebih efektif dan efisien.
- d) Untuk mengamplifikasi suaranya, Koarmada I secara aktif mengambil bagian dalam berbagai forum, diskusi, dan seminar terkait hukum laut dan keamanan maritim. Melalui partisipasi ini, Koarmada I dapat menyampaikan pandangan dan rekomendasi yang didasarkan pada pengalaman lapangan, mengenai perubahan regulasi yang dianggap penting.
- e) Meningkatkan pemahaman hukum di ALKI I dengan sumber daya manusia yang unggul. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada personel Koarmada I tentang hukum laut dan penegakan hukum di perairan Indonesia.
- f) Melakukan pengawasan aktif terhadap potensi pelanggaran hukum di perairan ALKI I. Melalui pengawasan ini, Koarmada I mendokumentasikan berbagai insiden dan pelanggaran yang terjadi. Laporan-laporan ini kemudian dapat dijadikan dasar untuk merevisi atau menguatkan regulasi yang ada, sesuai dengan dinamika lapangan.
- g) Memperkuat kerjasama internasional dengan negara-negara lain dalam bidang keamanan laut, seperti dengan ASEAN, APEC, dan UNCLOS. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan patroli bersama dan pertukaran informasi untuk mengatasi masalah keamanan laut di wilayah tersebut.

- h) Memperkuat pengawasan terhadap aktivitas ilegal di wilayah ALKI I, seperti penangkapan ikan ilegal, penambangan ilegal, dan kegiatan lain yang melanggar hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat kerjasama dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya.
- i) Mengoptimalkan Strategi Pertahanan laut Indonesia dalam rangka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa dari segi keamanan laut. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat kerjasama dengan pihak terkait dan memperhatikan kondisi lingkungan strategis regional dan nasional.

Sumber Daya Manusia. Hasil yang positif dari upaya-upaya ini terbukti dalam peningkatan kinerja Koarmada I dalam menindak pelanggaran hukum di perairan ALKI I. Personel dengan kapasitas dan kompetensi yang lebih baik mampu menghadapi tantangan dengan lebih siap dan efektif. Koarmada I tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM-nya, karena percaya bahwa investasi dalam SDM yang berkualitas akan mendukung efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas-tugasnya dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara di perairan ALKI I. Dengan cara ini, Koarmada I memberikan kontribusi positif dalam menjaga stabilitas maritim dan menjalankan peran strategis dalam menjaga keutuhan wilayah perairan yang sangat penting bagi negara.

- a) Merancang dan melaksanakan program pelatihan khusus yang terfokus pada penegakan hukum di perairan ALKI I. Program ini mencakup berbagai aspek hukum maritim, patroli maritim, teknik deteksi dan penanganan pelanggaran, serta taktik penegakan hukum yang efektif.
- b) Mendorong personelnya untuk mengikuti program sertifikasi profesional dalam bidang penegakan hukum maritim. Sertifikasi ini bukan hanya merupakan pengakuan atas kompetensi individu, tetapi juga merupakan standar internasional yang memberikan jaminan bahwa personel tersebut memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan praktik terbaik dalam penegakan hukum maritim.

- c) Melaksanakan latihan simulasi dan latihan lapangan. Dalam latihan ini, personel dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh dalam skenario nyata. Hal ini membantu dalam mempersiapkan mereka menghadapi situasi yang kompleks dan dinamis di perairan ALKI I.
- d) Memberikan pelatihan terkait penggunaan peralatan teknologi tinggi yang mendukung penegakan hukum maritim. Ini mencakup sistem pemantauan dan komunikasi canggih yang memungkinkan personel untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasi di lapangan.
- e) Mengembangkan program pelatihan yang komprehensif untuk personelnnya dalam bidang penegakan hukum maritim. Pelatihan mencakup berbagai aspek, seperti hukum laut, penegakan hukum, taktik operasi, penggunaan peralatan dan persenjataan, serta keterampilan komunikasi. Hal ini memastikan bahwa personel memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan tugas operasional.
- f) Mengirim perwakilan untuk menghadiri konferensi dan seminar internasional terkait penegakan hukum maritim. Ini memberikan peluang untuk belajar dari pengalaman negara lain, memahami praktik terbaik, dan memperluas jaringan kerja di lingkungan global.
- g) Menginvestasikan sumber daya dalam pengembangan instruktur internal yang ahli dalam bidang penegakan hukum maritim. Instruktur ini memiliki kapabilitas untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada personel lain, menjadikan pendekatan pelatihan menjadi lebih berkelanjutan.
- h) Menjalin kerja sama yang erat dengan berbagai instansi terkait, seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kerja sama ini memastikan bahwa upaya-upaya yang dilakukan Koarmada I selaras dengan kebijakan nasional dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak.

2. Strategi Kedua. Mewujudkan suatu kekuatan alutsista yang bisa mengcover seluruh perairan ALKI I dengan memilih berapa banyak alutsista, jumlah kapal perang atau kapal patroli, pesawat patroli maritim radar dan alat komunikasi yang akan di gelar dan jenis alutsista yang sesuai dengan karakteristik operasi pengamanan ALKI I.

Beberapa upaya lain yang dilakukan Koarmada I dalam memilih jenis alutsista yang sesuai dengan karakteristik operasi pengamanan ALKI I adalah:

- 1) Melakukan kajian dan penelitian yang mendalam. Langkah ini melibatkan analisis mendalam terhadap karakteristik operasi pengamanan di wilayah ALKI I dan kebutuhan operasional yang spesifik. Dalam konteks ini, Koarmada I bekerja untuk mengidentifikasi jenis alutsista yang paling sesuai untuk mengatasi tantangan yang mungkin timbul, seperti penyelundupan, ilegal fishing, dan ancaman lainnya.
- 2) Menjalin kerja sama yang erat dengan berbagai instansi terkait, termasuk Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Melalui kerja sama ini, Koarmada I dapat memastikan bahwa pengadaan alutsista sejalan dengan kebijakan nasional dan mempertimbangkan aspek-aspek yang lebih luas, seperti diplomasi dan kesejahteraan kelautan.
- 3) Menguji alutsista di lingkungan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, Koarmada I melaksanakan uji coba alutsista di perairan ALKI I untuk memastikan bahwa alutsista tersebut mampu beroperasi secara efektif dan efisien di tengah tantangan operasional yang sebenarnya. Ini membantu dalam mengidentifikasi potensi kelemahan dan memberikan kesempatan untuk perbaikan sebelum implementasi penuh.
- 4) Pengadaan alutsista tidak hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Koarmada I berupaya untuk memilih alutsista yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial negara. Hal ini penting untuk memastikan bahwa alutsista yang diadakan dapat dioperasikan dan dikelola secara berkelanjutan.

Koarmada I juga telah mengambil langkah-langkah konkret dalam pemilihan jenis alutsista yang sesuai dengan karakteristik operasi pengamanan di perairan ALKI I:

- 1) Mengoperasionalkan Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT): Koarmada I memiliki pendekatan terpadu dalam mengoperasikan sistem senjata armada yang melibatkan kapal, pesawat udara, marinir, dan pangkalan. Pendekatan ini memastikan koordinasi dan integrasi yang efektif dalam menjalankan operasi pengamanan.
- 2) Varian Kapal Perang Multirole: Koarmada I menyediakan berbagai jenis kapal perang multirole, termasuk kapal selam, kapal fregat, kapal korvet, kapal cepat rudal, dan kapal amfibi. Hal ini memungkinkan Koarmada I untuk memiliki fleksibilitas dalam menjalankan berbagai jenis operasi pengamanan.
- 3) Kapal Patroli dengan Kemampuan Khusus: Koarmada I juga memiliki kapal patroli dengan berbagai kemampuan, seperti surveilans, penegakan hukum, dan SAR. Kemampuan ini memastikan bahwa operasi pengamanan dapat dilakukan secara komprehensif dan responsif.
- 4) Pesawat Udara dengan Fungsi Terintegrasi: Penggunaan pesawat udara seperti pesawat CN-235 MPA, pesawat Boeing 737 MPA, dan pesawat CASA C-212 Aviocar memungkinkan Koarmada I untuk melaksanakan patroli maritim, anti kapal selam, dan anti udara dengan efisien.
- 5) Helikopter Multifungsi: Helikopter seperti AS-565 Panther dan NBO-105 memberikan kemampuan anti kapal selam, anti udara, dan SAR. Ini memungkinkan Koarmada I untuk merespons berbagai situasi dengan cepat.
- 6) Peralatan Deteksi Tinggi: Koarmada I menggunakan radar seperti Thales SMART-S Mk2 dan radar Thales TRS-3D untuk deteksi jarak jauh dan akurat, serta sonar seperti Thales TSM 2233 Mk2 dan Thales UMS 4132 Kingklip untuk deteksi bawah air.
- 7) Senjata Anti Kapal Selam: Peralatan seperti torpedo SUT Mod 4 dan torpedo Black Shark memberikan Koarmada I kemampuan menyerang target bawah air dengan presisi.

Upaya-upaya yang telah dijalankan oleh Koarmada I dalam memilih jenis alutsista yang sesuai dengan karakteristik operasi pengamanan di perairan ALKI I telah berhasil membawa hasil positif. Keberhasilan dalam menindak berbagai pelanggaran hukum, seperti penyelundupan, ilegal fishing, dan ancaman lainnya, adalah bukti konkrit dari efektivitas penggunaan alutsista yang telah dipilih. Perairan ALKI I kini telah menjadi lebih aman dan kondusif, membuktikan bahwa pendekatan yang matang dan strategis dalam pemilihan alutsista sangat penting dalam menjaga keamanan maritim dan kedaulatan negara. Koarmada I tetap berkomitmen untuk terus mengembangkan dan memperkuat kapabilitasnya dalam menjaga keamanan perairan ALKI I dan memberikan kontribusi positif dalam menjaga stabilitas maritim di kawasan.

3. Strategi Ketiga.

Mewujudkan perbaikan dan peningkatan kerjasama regional dan internasional dengan negara tetangga dan mitra strategis dalam mengatasi permasalahan keamanan laut di ALKI I, seperti *illegal fishing*, penyelundupan, dan kejahatan transnasional, meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan Lembaga pemerintahan terkait dalam penegakan hukum perairan Indonesia dan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat pesisir dalam menjaga keamanan laut di ALKI I, seperti melaporkan apabila terjadi pelanggaran hukum di ALKI I.

Dalam menjalankan sebuah penegakan hukum tentunya Koarmada I tidak bisa berdiri sendiri karena keterkaitan dengan Instansi pemerintahan lainnya, perlunya adanya peningkatan koordinasi dan kolaborasi dalam penegakan hukum perairan di ALKI I agar terciptanya kedaulatan Negara Republik Indonesia. Disamping itu perlunya kesadaran dan partisipasi Masyarakat sekitar dalam menjaga keamanan laut dari ilegal fishing, penyelundupan, dan kejahatan transnasional yang berdampak pada perubahan iklim. Upaya yang dilakukan oleh Koarmada I diantaranya:

- 1) Meningkatkan Koordinasi dan Kolaborasi dengan Lembaga Pemerintahan Terkait: TNI perlu meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan lembaga pemerintahan terkait



dalam penegakan hukum perairan Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat kerjasama dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya.

- 2) Peningkatan Kerjasama Regional dan Internasional: TNI perlu meningkatkan kerjasama regional dan internasional dengan negara-negara tetangga dan mitra strategis dalam mengatasi permasalahan keamanan laut di ALKI I, seperti illegal fishing, penyelundupan, dan kejahatan transnasional. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan patroli bersama, pertukaran informasi, dan kerjasama dalam penegakan hukum perairan Indonesia.
- 3) Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat Pesisir: TNI perlu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat pesisir dalam menjaga keamanan laut di ALKI I, terutama dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan kampanye publik dan sosialisasi kepada masyarakat setempat.
- 4) Memperkuat Strategi Pertahanan Laut Indonesia: TNI perlu memperkuat strategi pertahanan laut Indonesia dalam rangka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa dari segi keamanan laut. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat kerjasama dengan pihak terkait dan memperhatikan kondisi lingkungan strategis regional dan nasional.
- 5) Mengoptimalkan Pengawasan Terhadap Aktivitas Ilegal: TNI perlu mengoptimalkan pengawasan terhadap aktivitas ilegal di wilayah ALKI I, seperti penangkapan ikan ilegal, penambangan ilegal, dan kegiatan lain yang melanggar hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat kerjasama dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya.

Dalam mengoptimalkan strategi penegakan hukum di perairan Indonesia dan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, TNI perlu memperhatikan kondisi lingkungan strategis dan memperkuat kerjasama dengan pihak terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional.

4. Strategi Keempat

Meningkatkan jumlah kapasitas sarana prasarana yang dapat mendukung unsur - unsur operasi yang sedang melaksanakan operasi pengamanan dan penegakan hukum di perairan ALKI I.

Dalam rangka meningkatkan jumlah kapasitas sarana prasarana yang dapat mendukung unsur-unsur operasi yang sedang melaksanakan operasi pengamanan dan penegakan hukum di perairan ALKI I, khususnya dalam keterbatasan dukungan BBM B0 dan B35 di sebaran dermaga yang ada di ALKI I.

Pada data sebaran pangkalan jajaran Koarmada I di jalur ALKI I dengan dukungan infrastruktur dermaga sebaran logistik BBM B0 dan B35 yang ada tidak berbanding lurus dengan luas area sebaran KRI dalam melakukan gelar operasi penegakan hukum di ALKI I. KRI yang ada di perairan ALKI I dominan menggunakan BBM jenis B0, tetapi penyebaran logistic BBM jenis B0 tidak merata di semua dermaga yang ada. Saat ini hanya Lantamal III Jakarta, Lantamal IV Banten, Lanal Banten, dan Fasharkan Mentigi yang mensupport B0 dan B35. Adapun dermaga lainnya hanya mensupport B0 atau B35 saja, padahal mesin KRI yang saat ini digunakan untuk patroli dominannya support B0.

Hal ini dapat mempengaruhi efektivitas operasi keamanan laut, keterbatasan ini membuat sulit bagi Koarmada I untuk melakukan patroli yang efektif, pemantauan yang cermat, serta penegakan hukum yang optimal di perairan Indonesia. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah:

- 1) Langkah awal yang dilakukan oleh Koarmada I adalah melakukan *mapping* sebaran BBM B0 dan B35 di semua dermaga yang ada agar pengalokasian BBM sesuai dengan kebutuhan KRI dalam menjalankan operasi patrolinya.
- 2) Identifikasi Lokasi Strategis: Mengidentifikasi lokasi-lokasi strategis di sepanjang perairan ALKI I yang membutuhkan sebaran dermaga penunjang pembekalan BBM B0 dan B35. Lokasi ini harus mencakup daerah-daerah penting dalam operasi pengamanan dan penegakan hukum.



- 3) Perencanaan dan Desain Infrastruktur: Merencanakan dan merancang infrastruktur dermaga yang sesuai dengan kebutuhan pembekalan BBM B0 dan B35. Ini termasuk pemilihan lokasi, ukuran dermaga, fasilitas penyimpanan BBM, dan aksesibilitas yang baik.
- 4) Pemenuhan Persyaratan Teknis: Memastikan bahwa dermaga memenuhi semua persyaratan teknis dan keselamatan dalam penyimpanan dan distribusi BBM. Ini termasuk penanganan yang aman, tata letak yang sesuai, dan sistem pemadam kebakaran yang memadai.
- 5) Kolaborasi dengan Pihak Terkait: Bekerja sama dengan pemerintah, perusahaan BBM, dan lembaga terkait lainnya untuk memastikan dukungan dan perizinan yang diperlukan untuk pembangunan dermaga. Ini melibatkan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait.
- 6) Teknologi Monitoring dan Pengelolaan: Memasang teknologi monitoring seperti sensor pengukur level BBM dan sistem manajemen informasi untuk mengawasi persediaan BBM, permintaan, dan pemakaian di masing-masing dermaga.
- 7) Ketersediaan Bahan Bakar Alternatif: Selain BBM B0, mempertimbangkan penyediaan bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan seperti B35. Ini dapat membantu dalam diversifikasi pasokan bahan bakar.
- 8) Keamanan dan Keandalan: Memastikan bahwa dermaga dan fasilitas penyimpanan BBM aman dari ancaman fisik dan kebocoran. Sistem keamanan dan pengawasan perlu dipasang untuk menjaga integritas dan keandalan infrastruktur.
- 9) Pemeliharaan Rutin: Merencanakan jadwal pemeliharaan rutin untuk memastikan bahwa dermaga dan fasilitasnya tetap dalam kondisi yang baik. Ini mencakup perawatan, pembersihan, dan penggantian peralatan yang rusak.
- 10) Pelatihan dan Kepatuhan Personel: Melatih personel yang bertanggung jawab atas operasi dermaga dalam hal penanganan BBM, keselamatan, dan prosedur kepatuhan. Ini akan memastikan operasi yang aman dan efisien.

- 11) Pemantauan Ketersediaan dan Permintaan: Melakukan pemantauan terhadap ketersediaan BBM B0 dan B35 serta permintaan dari kapal-kapal patroli. Ini akan membantu dalam mengoptimalkan pasokan dan meminimalkan risiko kelangkaan.

Melalui implementasi upaya-upaya ini, jumlah kapasitas sarana prasarana sebaran dermaga penunjang pembekalan BBM B0 dan B35 dapat ditingkatkan, memastikan dukungan yang memadai untuk unsur-unsur operasi pengamanan dan penegakan hukum di perairan ALKI I.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Koarmada I adalah komando utama operasional dan pembinaan TNI AL yang bertanggung jawab atas keamanan dan kedaulatan wilayah laut Indonesia, khususnya di ALKI I. Pada pelaksanaannya, Operasi keamanan laut Koarmada I yang dilaksanakan selama 350 hari dengan kekuatan 300 personil, ditemui permasalahan-permasalahan.

Koarmada I bersinergi dengan berbagai pihak dalam rangka penegakan hukum di laut, pada penelitian ini ditunjukkan dengan penggunaan bersama dan *sharing data* dalam aplikasi pemantauan keamanan laut antara Puskodal Koarmada I dan unsur penegak hukum di laut dalam pelaksanaan operasi keamanan laut saat ini.

Tujuan yang diharapkan adalah terwujudnya sebuah regulasi/payung hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan bagi TNI AL yang berkaitan dengan pelanggaran hukum di perairan Indonesia sangat dinantikan oleh Koarmada I agar terciptanya penegakan hukum yang efektif dan efisien. Disamping itu Sumber Daya Manusia yang dimiliki harus meningkatkan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki dalam penegakan hukum di maritim ALKI I melalui pelatihan, Pendidikan, dan sertifikasi yang berkualitas dan sesuai dengan standar internasional. Selanjutnya Koarmada I memiliki alutsista yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan operasi pengamanan ALKI I, dengan melakukan Analisa kebutuhan alutsista berdasarkan ancaman, sasaran dan lingkungan operasi ALKI I,

memilih jenis alutsista yang sesuai dengan karakteristik operasi pengamanan ALKI I, serta memelihara dan memodernisasi alutsista secara berkala dan terencana.

Rekomendasi

Merespon dinamika operasi keamanan laut Koarmada I guna penegakan hukum di ALKI I yang dibutuhkan untuk mendorong Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dalam penegakan hukum perairan dengan alutsista, sarana dan prasarana yang memadai, yang ditunjang oleh payung hukum yang kuat sehingga menghasilkan sebuah keputusan hukum yang baik. Hal tersebut diatas dapat dijadikan momentum untuk perbaikan dari segala aspek di ALKI I yang lebih luas sehingga perlunya saran masukan sebagai berikut:

- a. Koarmada I perlu mendorong pengkajian dan penelitian yang mendalam dengan informasi yang kuat untuk mengubah regulasi dan payung hukum yang mendukung penegakan hukum di ALKI I. Kolaborasi dengan pihak terkait dan lembaga legislatif sangat penting untuk membentuk regulasi yang lebih efektif sesuai dengan kondisi perairan ALKI I dan kepentingan nasional. Dan dalam meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam bidang penegakan hukum maritim harus didukung oleh program pelatihan khusus, sertifikasi profesional, penggunaan teknologi tinggi, dan pengembangan instruktur internal yang ahli dalam penegakan hukum maritim.
- b. Dengan alutsista yang memadai, Koarmada I dapat meningkatkan efektivitas operasi keamanan laut melalui patroli, pengawasan, intersepsi, dan pemantauan kapal-kapal yang melanggar hukum di perairan ALKI I. Hal ini dapat memperkuat respons cepat terhadap ancaman, mencegah tindakan kriminal, dan meningkatkan deterrensi terhadap pelanggar hukum.
- c. Menghadapi kompleksitas permasalahan di ALKI I, sinergi dan koordinasi yang baik antara berbagai pihak dalam penegakan hukum menjadi kunci. Tujuannya adalah menciptakan penegakan hukum yang adil dan tepat sasaran terhadap pelanggaran

hukum di perairan, menghindari kesalahan dalam penindakan, dan memastikan pengambilan keputusan yang tepat.

- d. Sarana dan prasarana yang memadai sangat penting untuk meningkatkan efisiensi operasi penegakan hukum di perairan ALKI I. Ini mencakup, pangkalan TNI AL, fasilitas dermaga, fasilitas perbaikan, sistem pemantauan maritim, sistem komunikasi, fasilitas logistik, dan peralatan navigasi. Kerja sama dengan industri dalam negeri dapat memastikan pengembangan sarana dan prasarana yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan.
- e. Panglima TNI melaksanakan MOU dengan Kementerian lembaga terkait dalam pelaksanaan penegakan hukum di ALKI I

Daftar Pustaka

Booth, K. (1977). *Navies and Foreign Policy*. (ed.1). London: Routledge.

bakamla.go.id. (2024). Tugas dan Fungsi. Diakses dari https://www.bakamla.go.id/profile/job_and_function diakses pada 19 November 2024
koarmada1.tnial.mil.id (2024). Wilayah Tanggungjawab Komando Armada I. diakses dari <https://koarmada1.tnial.mil.id/laman/wilayah-tanggungjawab-komando-armada-i> diakses pada 19 November 2024

Law.ui.ac.id (2018). "Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia". diakses dari <https://law.ui.ac.id/v3/penegakan-hukum-di-wilayah-laut-indonesia/>

Hart, Liddle. H. (2001). *Strategy (2nd Edition)*. New York, NY: Frederick Praeger Publisher

Susmoro, Harjo, Amril, Oke Dwiyan. (2019). *Peran Pushidrosal Dalam Turut Mewujudkan Indonesia Menjadi Poros Maritim Dunia*. Jakarta: Pushidrosal.

Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia

Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditentukan:

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia